

PEMANFAATAN TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK OLEH GURU SMP NEGERI DI KOTA BLITAR

Cici Kristiya Andayani

12040254026 (Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) cicikristiya@gmail.com

Totok Suyanto

0004046307 (Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) totoksuyanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan gambaran umum pemanfaatan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) oleh guru-guru SMP Negeri di kota Blitar. Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG) di kota Blitar dari tahun 2012 sampai 2015 di atas rata-rata nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah 155 guru dari seluruh SMP Negeri yang ada di kota Blitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan TPP oleh guru di SMP Negeri kota Blitar ini ada yang digunakan untuk menunjang kompetensi dan ada yang tidak, terutama kompetensi pedagogik dan profesionalisme. Dari hasil analisis data diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah responden sebanyak 70% untuk menunjang peningkatan kompetensi. Sedangkan sisanya 30% menggunakan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) untuk konsumtif (untuk kebutuhan lain yang non kompetensi).

Kata kunci: tunjangan, guru, kompetensi.

Abstract

This research was conducted with the purpose to describe a general overview of the utilization benefits professionals educators (TPP) by teachers in Junior High School that from the beginning of UKG 2012 until 2015, Blitar always get score above the national average. This research used type of quantitative approach and descriptive methods. Respondents in this research is 155 teachers from all of Junior High School in Blitar City. The technique of collecting data using questionnaires and documentation. The results showed that teachers in Junior High School of Blitar in utilizing the existing TPP is used to support the competence and some are not. From the data analysis result known that from the total number of respondents was 70% to support the promotion of competence. While the remaining 30% using benefits professionals educators(TPP) for the consumer (for other needs of the non-competence).

Keywords: benefits, teachers, competence.

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan salah satunya ditentukan dari kinerja guru, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nana Sudjana dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan 76,6% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kinerja guru dengan rincian kemampuan mengajar 32,43%, penguasaan materi 32,38% dan sikap guru 8,60% (Sudjana, 2002:42). Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk terus-menerus meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program peningkatan profesionalisme guru. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu guru terbukti dengan disahkannya Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempertegas status guru sebagai pendidik profesional.

Pada pasal 8 UUGD menyatakan bahwa untuk menjadi guru yang profesional wajib memiliki sejumlah persyaratan yakni kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Persyaratan tersebut dapat dipenuhi guru melalui program sertifikasi. Pengertian sertifikasi menurut Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 pasal 1 mengatakan bahwa “sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. Maka sertifikasi dapat diartikan suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, pengakuan sebagai tenaga pengajar profesional tersebut berupa pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti formal.

Guru yang telah lulus dari program sertifikasi kemudian akan mendapatkan sertifikat pendidik dan menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor pada pasal 1:

“tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya”.

Pemerintah memberikan TPP melalui sertifikasi guru supaya guru termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka sehingga akan berdampak terhadap peningkatan prestasi siswa. Pembayaran TPP dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan namun hal itu tidak serta merta meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 di mana dari 34 provinsi yang mengikuti hanya 10 (sepuluh) provinsi saja yang mendapatkan nilai diatas rata-rata nasional (53,05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan guru di Indonesia saat ini masih banyak yang berada dibawah standar. Sedangkan provinsi dengan nilai terbaik urutan pertama diduduki oleh DI Yogyakarta (62,36), Jawa Tengah (58,93), DKI Jakarta (58,36), Jawa Timur (56,71), Bali (55,92), Jawa Barat (55,15), dan Bangka Belitung (55,10).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengungkapkan, “saat ini sangat sedikit guru yang memperoleh nilai yang baik dalam UKG. Dari 1.611.251 guru yang mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) dan UKG pada 2012-2014, hanya 192 orang yang memiliki skor 90-100”. Berdasarkan hasil UKG diketahui bahwa secara umum kompetensi guru masih banyak yang berada dibawah standar, walaupun jumlah guru yang menerima TPP cukup banyak dan setiap tahun meningkat. Kondisi yang tidak seimbang antara pemberian TPP dan kompetensi guru merupakan permasalahan yang serius. Dalam hal ini pemanfaatan dan penggunaan TPP menjadi penting untuk diketahui dan dievaluasi kembali.

TPP yang diberikan oleh pemerintah kepada guru daerah, yang disalurkan melalui dana alokasi umum daerah di setiap kabupaten dan kota seluruh wilayah Indonesia salah satunya di kota Blitar. Kota Blitar berada di provinsi Jawa Timur yang menduduki urutan ke-empat dari 7 (tujuh) provinsi dengan nilai UKG terbaik tahun 2015. Selain itu pada UKG di tahun 2012, Blitar merupakan kabupaten atau kota dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 56,41.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada bulan Januari 2016 di Dinas Pendidikan Kota Blitar bagian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mengatakan bahwa guru-guru di kota Blitar banyak yang sudah bersertifikasi artinya sudah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran umum pemanfaatan dan penggunaan TPP oleh guru-guru di kota Blitar yang sudah memenuhi standar kompetensi. Dan berdasarkan

hasil observasi awal yang dilakukan, banyak prestasi yang diperoleh dari peserta didik kota Blitar, di mana beberapa prestasi yang berhasil diperoleh berasal dari para peserta didik jenjang SMP Negeri yang mendapatkan berbagai penghargaan di bidang akademik maupun non akademik. Oleh karena itu penelitian ini lebih tepat dilakukan pada jenjang SMP Negeri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan rumusan masalah yakni: bagaimana gambaran umum pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri di kota Blitar. Sedangkan tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan TPP oleh guru-guru yang mengajar di SMP Negeri kota Blitar. Batasan Penelitian ini yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada guru-guru PNS Daerah penerima tunjangan profesi di SMP Negeri se-kota Blitar. Penelitian ini hanya meneliti tentang pemanfaatan TPP oleh guru. Penelitian ini tidak mengukur kompetensi dan kinerja guru tetapi hanya mendeskripsikan gambaran umum pemanfaatan TPP dan sejauh mana TPP digunakan oleh guru, penggunaannya dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu untuk menunjang kompetensi atau digunakan untuk kebutuhan lain di luar kompetensi.

Secara etimologis, tunjangan profesi berasal dari kata “tunjangan” dan “profesi”. Secara harfiah tunjangan adalah uang atau barang yang dipakai untuk menunjang, tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan atau sokongan. Sedangkan profesi secara harfiah adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan tertentu.

Wahyudi (2012:47) mengatakan bahwa, tunjangan profesi merupakan tunjangan yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Maka dapat diartikan bahwa tunjangan profesi adalah tambahan pendapatan di luar gaji pokok yang diberikan kepada seseorang yang bekerja atas dasar kejuruan atau ketrampilan profesional dibidang tertentu. Sedangkan menurut Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional (2008:5), tunjangan profesi adalah:

“tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru tetap bukan PNS baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tunjangan profesi pendidik merupakan pendapatan di luar gaji pokok yang diberikan kepada guru atau dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas keprofesionalitasnya.

Ada tiga asas yang menjadi pegangan pemerintah dalam menyalurkan TPP ini, yaitu: (1) tepat sasaran maksudnya TPP disalurkan kepada guru yang berhak, yaitu yang memenuhi persyaratan, antara lain memenuhi 24 jam tatap muka dan *linier* dengan bidang sertifikasinya; (2) tepat jumlah berarti jumlah TPP yang disalurkan harus senilai dengan satu kali gaji pokok guru. Untuk guru PNS, gaji pokok ini juga harus diperhatikan karena gaji pokok guru PNS naik sesuai kenaikan golongannya; (3) tepat waktu, bagi guru PNS penyaluran TPP dilakukan pemerintah daerah melalui dana transfer daerah. Sedangkan untuk guru non-PNS, penyaluran TPP dilakukan pemerintah pusat.

Pada PP (Peraturan Pemerintah) No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, telah dijelaskan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen; pemberian sertifikat pendidik dilaksanakan melalui program Sertifikasi Guru; (2) memenuhi beban kerja sebagai guru; yakni memenuhi 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah. Kewajiban guru dalam pembelajaran dengan jumlah jam diatas harus didukung dengan melaksanakan kegiatan pokok yaitu: merencanakan pembelajaran yang menjadi tanggungjawab dan beban kerja guru, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan beban kerja guru, menilai pembelajaran dalam kelas yang sesuai dengan beban kerja guru, membimbing dan melatih peserta didik sesuai dengan beban kerja guru, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru; (3) mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan; satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah; (4) pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya, sebagai contoh di lapangan, seorang guru yang memiliki ijazah S1 PPKn lulus sertifikasi, dan memegang sertifikat sebagai guru profesional di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan, hendaknya mengajar mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di satuan pendidikan tempatnya bertugas; (5) terdaftar pada departemen sebagai guru tetap; hal ini ditandai dengan pemberian satu nomor registrasi unik oleh departemen; (6) berusia paling tinggi enam puluh tahun; (7) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Guru yang profesional harus memiliki dan menguasai seperangkat kompetensi. Menurut Barlow (dalam Daryanto, 2013:157) kompetensi adalah:

“the ability of a tacher to responsibly perform his or her duties appropriately atau kemampuan seorang guru untuk menunjukkan secara bertanggung jawab tugas-tugasnya dengan tepat”.

Sedangkan Broke and Stone (dalam Mulyasa, 2013:62) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan gambaran kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti. Maka kompetensi dapat diartikan sebagai perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

Pada pasal 1 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Sementara pada pasal 10 menjelaskan bahwa kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Secara etimologis, kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani, *paedos* dan *agogos* (*paedos*= anak dan *agoge* = mengantar atau membimbing) karena itu pedagogik berarti membimbing anak, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang. Menurut Payong (2011:16) kompetensi pedagogik adalah:

“kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”

Permendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru telah menggaris bawahi 10 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh guru yang terkait dengan standar kompetensi pedagogis, yang diantaranya meliputi: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, emosional, dan intelektual; (2) menguasai teori-teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mapel; (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; (8) menyelenggarakan penilaian

dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Menurut Payong (2011:18) yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah: “kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia”. Sedangkan menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007, kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup lima kompetensi utama yakni: (1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia; (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; (5) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Adapun yang dimaksud dengan kompetensi sosial menurut Payong (2011:19) adalah:

“kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar”.

Kompetensi sosial guru ini nampak dalam kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 kemampuan dalam standar kompetensi sosial guru mencakup empat kompetensi utama yaitu: (1) bersikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; (2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat; (3) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; (4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Menurut Payong (2011:21) pengertian kompetensi profesional merupakan:

“kemampuan guru dalam menguasai struktur keilmuan atau materi pelajaran secara luas dan mendalam atau kemampuan guru dalam membimbing peserta didik untuk memahami materi secara maksimal”.

Lebih spesifik lagi menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007, standar kompetensi profesional dijabarkan ke dalam lima kompetensi inti, yakni: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi, dan kompetensi dasar mata pelajaran

atau bidang pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Sudjana (dalam Usman, 2006:14) mengatakan bahwa “profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencarian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian”. Pendapat lain tentang profesionalisme adalah suatu kondisi, nilai, tujuan, kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencarian seseorang, apabila mata pencariannya sebagai guru maka berkaitan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, itulah yang disebut dengan profesionalisme guru. (Kunandar, 2011:46). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.

Menurut Sembiring (2009:45) sosok guru profesional yaitu: (1) guru harus mendapat penghargaan yang baik (*Well Paid*), ketika seorang guru telah terdidik dan terlatih baik, tentu ada penghargaan yang baik pula dalam bentuk materi. Termasuk di dalamnya soal gaji yang belum memadai dan kerap dikeluhkan. Guru jika sudah menjalani kewajiban secara profesional mendapat penghasilan layak beserta tunjangan; (2) guru harus terdidik dengan baik (*Well Educated*), profesionalisme guru muncul seiring dengan adanya pendidikan yang baik sebelum seseorang bisa mendidik, dia sendiri harus sudah terlebih dahulu terdidik dengan baik. Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 pasal 8 dan 9 yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan harus lulus sertifikasi agar diakui kekompetensinya sebagai tenaga pengajar profesional; (3) jaminan kualitas (*Quality Assure*), profesionalisme guru memiliki jaminan kualitas. Guru harus pernah dan memiliki akses melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk menjadi profesional. Pelatihan mencakup penyediaan program kependidikan akademik, guna mendapatkan kualifikasi akademik. Disamping itu, ada pula program pembentukan kemampuan profesional yang mengarah pada pemerolehan sertifikasi profesi guru; (4) Perlindungan hukum, guru harus terlindungi dengan baik, para pendidik harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya sesuai tuntutan profesi. Jadi harus ada jaminan kepastian hukum yang melindungi hak dan kewajiban para pendidik.

Sementara itu, Kunandar (2011:45) mengatakan bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional; (1) kompetensi pedagogik ialah memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengembangkan potensi peserta didik; (2) kompetensi kepribadian: mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan; (3) kompetensi sosial: berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua wali, dan masyarakat; (4) kompetensi profesional: menguasai substansi keilmuan bidang studi, dan menguasai struktur dan metode keilmuan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki guru berpengaruh besar dalam membentuk profesionalisme karena kompetensi merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh guru profesional. Sedangkan guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan tercermin dalam sikap terhadap peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi yang dimiliki atau kemampuan akademiknya.

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow, yang mana variasi kebutuhan manusia tersusun dalam bentuk hirarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi apabila jenjang yang lain telah (relatif) terpenuhi. Menurut Maslow (dalam Asmadi, 2008:19) kebutuhan dasar manusia terdiri atas lima hirarki: (1) kebutuhan Fisiologis merupakan kebutuhan biologis yang termasuk kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia dan harus terpenuhi; (2) kebutuhan Keamanan (*Safety*) yakni berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang; (3) kebutuhan Cinta, Sayang dan Kepemilikan (*Belonging and Love*) adalah kebutuhan dasar yang menggambarkan emosi seseorang; (4) kebutuhan Harga Diri (*Self Esteem*) penghargaan terhadap diri sendiri sering merujuk pada penghormatan diri, dan pengakuan dari orang lain; (5) kebutuhan Aktualisasi Diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan otonominya sendiri serta bebas dari tekanan luar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian menggunakan metode deskriptif menurut Sugiyono (2008:85) merupakan penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Metode kuantitatif deskriptif dianggap sesuai dengan permasalahan yang diteliti karena penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran umum pemanfaatan TPP oleh guru di seluruh SMP Negeri kota Blitar, sehingga penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif.

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di seluruh SMP Negeri yang ada di kota Blitar yang terdiri atas SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, dan SMP Negeri 10 Blitar.

Adapun populasi penelitian ini ialah seluruh guru PNS Daerah SMP Negeri se-kota Blitar yang bersertifikasi dan mendapatkan TPP.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

Sekolah	Jumlah Guru	Sampel
SMPN 1 Kota Blitar	36	7
SMPN 2 Kota Blitar	41	30
SMPN 3 Kota Blitar	39	14
SMPN 4 Kota Blitar	37	20
SMPN 5 Kota Blitar	34	13
SMPN 6 Kota Blitar	41	18
SMPN 7 Kota Blitar	35	11
SMPN 8 Kota Blitar	34	27
SMPN 9 Kota Blitar	40	10
SMPN 10 Kota Blitar	23	5
TOTAL	360 guru	155 guru

Sumber: Dinas Pendidikan dan Daerah Kota Blitar

Teknik yang dipilih untuk menentukan sampel penelitian ini adalah *Simple Random Sampling*, sedangkan untuk menentukan jumlah sampel dari populasi tertentu menggunakan tabel penentuan sampel yang dikembangkan oleh Sugiyono (2008:87). Penentuan sampel penelitian ini menggunakan taraf kesalahan 10% dan jumlah $N = 360$, maka diperoleh 155 responden.

Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder menggunakan dokumentasi data yang sudah diolah oleh pihak lembaga atau institusi tertentu, seperti data jumlah guru bersertifikasi dan profil umum sekolah SMP Negeri se-kota Blitar.

Pengolahan dan analisis data penelitian ini menggunakan analisis data statistik dan analisis deskriptif. Teknik analisis data dijabarkan sebagai berikut: (1) *editing*, dilakukan untuk meneliti lengkap tidaknya pengisian kuesioner oleh responden, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian dan keajekan antara jawaban pertanyaan satu dengan pertanyaan lain; (2) *coding*, mengklarifikasikan jawaban

responden menurut macam-macamnya, yaitu pemberian kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama; (3) *skoring*, dalam pemberian skor yang digunakan skala likert, yaitu dengan menyusun pertanyaan atau pernyataan yang masing-masing item diberi range skor dalam skala *likert*. Klarifikasi data hasil kuesioner berdasarkan 5 (lima) kategori yaitu: nilai 5 untuk jawaban Selalu (SL), nilai 4 untuk jawaban Sering (SG), nilai 3 untuk jawaban Kadang-kadang (KK), nilai 2 untuk jawaban Hampir Tidak Pernah (HTP), nilai 1 untuk jawaban Tidak Pernah (TP)

Untuk menghitung persentase dari hasil kuesioner yang telah diolah, menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Sumber: Sugiyono, 2008

Keterangan:

- P : Persentase
f : Frekuensi data
N : Jumlah sampel yang diolah

Setelah menghitung persentase jawaban maka dimasukkan dalam kelas interval untuk menentukan menentukan tingkatan nilai dari hasil variabel yang diukur. Nilai pada kelas interval dinyatakan dalam persentase pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Skor

Kelas	Kriteria Interpretasi Skor	Kategori
1	81% - 100%	Sangat Baik
2	61% - 80%	Baik
3	41% - 60%	Cukup Baik
4	21% - 40%	Kurang Baik
5	0% - 20%	Sangat Kurang Baik

Sumber: Riduwan, 2010

Untuk mengetahui persentase total jawaban responden masing-masing indikator dan skor total untuk masing-masing sub variabel menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah Skor Ideal (kriterium)}} \times 100\%$$

Sumber: Sugiyono, 2008

Hasil dari perhitungan jumlah skor untuk setiap sub indikator dan indikator yang dinyatakan dalam bentuk persentase kemudian dikategorikan sesuai dengan kelas interval. Maka tahap selanjutnya dilakukan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data yang masih dalam bentuk angka diubah menjadi kata-kata agar mudah dipahami. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diberikan kepada guru-guru SMP Negeri yang menerima TPP di kota Blitar. Dalam angket ini terdapat beberapa pernyataan yang perlu dijawab oleh guru. Kisi-kisi pernyataan dalam angket penelitian ini terdiri atas satu variabel yaitu pemanfaatan TPP yang

dapat dibedakan menjadi dua indikator yaitu kompetensi dan non kompetensi. Pada indikator kompetensi terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional, sedangkan pada indikator non kompetensi terdiri atas kebutuhan fisik atau jasmani, kebutuhan psikologis dan rohani, dan kebutuhan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran umum pemanfaatan TPP oleh Guru SMP Negeri kota Blitar dilihat dari aspek kompetensi yang terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pemanfaatan TPP Pada Sub Indikator Pedagogik

Pernyataan	Persentase Jawaban Responden		
	Menggunakan	Tidak	Kategori
Penggunaan TPP untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi	46,49%	53,51%	Cukup Baik
Penggunaan TPP untuk mengikuti seminar dan workshop	74,7%	25,3%	Baik
Penggunaan TPP untuk berlangganan koran dan majalah	73,77%	26,23%	Baik
Penggunaan TPP untuk pembuatan bahan ajar	81%	19%	Sangat Baik
Penggunaan TPP untuk membeli laptop, printer, speaker, flasdisk dan kebutuhan mengajar lainnya	81%	19%	Sangat Baik
Penggunaan TPP untuk membiayai penelitian tindakan kelas	66,49%	33,51%	Baik
Penggunaan TPP untuk berlangganan wifi	75,23%	24,77%	Baik
Total	69%	31%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 3, skor total pada sub indikator kompetensi pedagogik yaitu sebesar 3.754. Sementara skor ideal pada sub indikator ini yaitu: $5 \times 7 \times 155 = 5.425$. Maka total perhitungan skor jawaban responden pada sub indikator kompetensi pedagogik ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Skor Jawaban} &= \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{3.754}{5.425} \times 100\% \\ &= 69\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dikatakan bahwa guru SMP Negeri di kota Blitar yang menggunakan TPP untuk kompetensi pedagogiknya sebanyak 69% dari jumlah keseluruhan responden. Secara umum pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri kota Blitar dilihat dari kompetensi pedagogik dikatakan baik, karena hanya 31% yang tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan kompetensi pedagogiknya. Meskipun ada item pernyataan yang memperoleh kategori cukup baik, karena persentase yang menggunakan rendah yaitu hanya 46,49%. Hal tersebut dapat terjadi karena bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi membutuhkan pertimbangan waktu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, sedangkan kondisi guru SMP Negeri di kota Blitar rata-rata tidak memungkinkan untuk memenuhinya. Adapun penggunaan TPP dilihat dari aspek kompetensi pedagogik paling tinggi berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk pembuatan bahan ajar dan penggunaan TPP untuk membeli laptop, printer, speaker, flasdisk dan kebutuhan mengajar lainnya, dengan total persentase yang menggunakan sama-sama 81%.

Tabel 4. Pemanfaatan TPP Pada Sub Indikator Kepribadian

Pernyataan	Persentase Jawaban Responden		
	Menggunakan	Tidak	Kategori
Penggunaan TPP untuk memberikan sedekah pada masyarakat	71,12%	28,88%	Baik
Penggunaan TPP untuk menyumbangkan hadiah kepada peserta didik saat ada kegiatan sekolah	69,4%	30,6%	Baik
TOTAL	68,45%	31,55%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 4, skor total pada sub indikator kompetensi kepribadian sebesar 1.061. Sementara skor ideal pada sub indikator ini yaitu: $5 \times 2 \times 155 = 1.550$. Maka total perhitungan skor jawaban responden pada sub indikator kompetensi kepribadian:

$$\begin{aligned}\text{Skor Jawaban} &= \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{1.061}{1.550} \times 100\% \\ &= 68,45\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikatakan bahwa guru SMP Negeri di kota Blitar yang menggunakan TPP untuk kompetensi kepribadian sebanyak 68,45% dari jumlah keseluruhan responden. Secara umum pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri kota Blitar dilihat dari kompetensi kepribadian dikatakan baik, karena hanya 31,55% yang tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan kompetensi kepribadiannya. Adapun persentase yang menggunakan paling tinggi berada pada item pernyataan penggunaan TPP untuk memberikan sedekah kepada masyarakat, sebanyak 71,12%.

Tabel 5. Pemanfaatan TPP Pada Sub Indikator Sosial

Pernyataan	Persentase Jawaban Responden		
	Menggunakan	Tidak	Kategori
Penggunaan TPP untuk berpartisipasi kepada peserta didik ketika orang tuanya meninggal	70,7%	29,3%	Baik
Penggunaan TPP untuk berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di luar lingkungan sekolah	68,21%	31,79%	Baik
TOTAL	67,66%	32,34%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 5, skor total pada sub indikator kompetensi sosial yaitu sebesar 1.049. Sementara skor ideal pada sub indikator ini yaitu: $5 \times 2 \times 155 = 1.550$. Maka total perhitungan skor jawaban responden pada sub indikator kompetensi sosial:

$$\begin{aligned}\text{Skor Jawaban} &= \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{1.049}{1.550} \times 100\% \\ &= 67,66\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikatakan bahwa guru SMP Negeri di kota Blitar yang menggunakan TPP untuk kompetensi sosial sebanyak 67,66% dari jumlah keseluruhan responden. Secara umum pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri kota Blitar dilihat dari kompetensi sosial dikatakan baik, karena hanya 32,34% yang tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan kompetensi sosial. Adapun persentase yang menggunakan paling tinggi berada pada item pernyataan tentang partisipasi kepada peserta didik ketika orang tuanya meninggal sebanyak 70,7%.

Tabel 6. Pemanfaatan TPP Pada Sub Indikator Profesional

Pernyataan	Persentase Jawaban Responden		
	Menggunakan	Tidak	Kategori
Penggunaan TPP untuk membeli buku yang relevan untuk mengajar	75%	25%	Baik
Penggunaan TPP untuk mengembangkan materi pembelajaran dengan buku edukatif	76%	24%	Baik
TOTAL	73,61%	26,39%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 6, skor total pada sub indikator kompetensi profesional sebesar 1.141. Sementara skor ideal pada sub indikator ini yaitu: $5 \times 2 \times 155 = 1.550$. Maka total perhitungan skor jawaban responden pada sub indikator kompetensi profesional:

$$\begin{aligned} \text{Skor Jawaban} &= \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{1.141}{1.550} \times 100\% \\ &= 73,61\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikatakan bahwa guru SMP Negeri di kota Blitar yang menggunakan TPP untuk kompetensi profesional sebanyak 73,61% dari jumlah keseluruhan responden. Secara umum pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri kota Blitar dilihat dari kompetensi profesional dikatakan baik, karena hanya 26,39% yang tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan kompetensi profesional. Adapun persentase yang menggunakan paling tinggi berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk mengembangkan materi pembelajaran dengan buku edukatif sebanyak 76%.

Gambaran umum pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri di kota Blitar dilihat dari aspek non kompetensi yang terdiri atas sub indikator kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarga, kebutuhan psikologis dan rohani anak serta keluarga, dan kebutuhan rumah tangga. Adapun hasil penelitian berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 155 guru sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 7 tentang pemanfaatan TPP pada sub indikator kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarga, jumlah skor totalnya adalah 2.627. Sementara skor ideal pada sub indikator ini yaitu: $5 \times 5 \times 155 = 3.875$. Maka total perhitungan skor jawaban responden pada sub indikator kebutuhan fisik atau jasmani:

$$\text{Skor Jawaban} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2.627}{3.875} \times 100\% \\ &= 67,79\% \end{aligned}$$

Tabel 7. Pemanfaatan TPP Pada Sub Indikator Kebutuhan Fisik atau Jasmani Anak dan Keluarga

Pernyataan	Persentase Jawaban Responden		
	Tidak	Menggunakan	Kategori
Penggunaan TPP untuk anak atau keluarga yang sakit	62,38%	37,62%	Baik
Penggunaan TPP untuk membeli alat-alat kesehatan, obat atau vitamin guna menjaga kesehatan anak dan keluarga	66,89%	33,11%	Baik
Penggunaan TPP untuk kebutuhan baju anak dan suami atau istri	68%	32%	Baik
Penggunaan TPP untuk kebutuhan seragam, sepatu, dan tas anak maupun keluarga	70,73%	29,27%	Baik
Penggunaan TPP untuk kebutuhan make-up, alat kecantikan, perhiasan anak dan keluarga	79,87%	20,13%	Baik
TOTAL	67,79%	32,21%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan sajian dalam tabel 7 tersebut, dapat diketahui bahwa guru SMP Negeri di kota Blitar yang menggunakan TPP untuk kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarganya 32,21% dari jumlah keseluruhan responden. Secara umum guru SMP Negeri kota Blitar dalam pemanfaatan TPP untuk kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarga dikatakan baik, karena 67,79% guru tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarga. Adapun persentase yang menggunakan paling tinggi berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk anak atau keluarga yang sakit sebanyak 37,62%. Hal tersebut dapat terjadi karena kebutuhan akan kesehatan anak dan keluarga sangat penting, peristiwa yang tidak terduga seperti kecelakaan, kematian membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sementara kondisi guru belum tentu dapat memenuhi pembiayaan terhadap peristiwa yang tidak terduga tersebut.

Persentase yang menggunakan paling sedikit berada pada item pernyataan yang menyatakan tentang penggunaan TPP untuk kebutuhan *make-up*, alat kecantikan, perhiasan anak dan keluarga hanya 20,13%, berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa, guru SMP Negeri di kota Blitar banyak yang tidak menggunakan dana TPP untuk kebutuhan *make-up*, alat kecantikan, perhiasan anak dan keluarganya karena kebutuhan tersebut tidak ada kaitannya dengan suatu hal yang menunjang peningkatan kompetensi.

Tabel 8. Pemanfaatan TPP Pada Sub Indikator Kebutuhan Psikologis dan Rohani Anak Serta Keluarga

Pernyataan	Persentase Jawaban Responden		
	Tidak	Menggunakan	Kategori
Penggunaan TPP untuk biaya sekolah atau kuliah anak	65,69 %	34,31%	Baik
Penggunaan TPP untuk bimbingan belajar anak	67,81 %	32,19%	Baik
Penggunaan TPP untuk membiayai umroh atau haji	79%	21%	Baik
Penggunaan TPP untuk bimbingan belajar al-quran anak atau keagamaan lainnya	78,28 %	21,72%	Baik
Penggunaan TPP untuk jalan-jalan dan berwisata bersama keluarga	75,5%	24,5%	Baik
TOTAL	71,5%	28,5%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Pada tabel 8, skor total pada sub indikator kebutuhan psikologis dan rohani anak serta keluarganya sebesar 2.767. Sementara skor ideal pada sub indikator ini yaitu: $5 \times 5 \times 155 = 3.875$. Maka total perhitungan skor jawaban responden pada sub indikator kebutuhan psikologis dan rohani anak serta keluarganya:

$$\begin{aligned} \text{Skor Jawaban} &= \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{2.767}{3.875} \times 100\% \\ &= 71,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan sajian dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa guru SMP Negeri di kota Blitar yang menggunakan TPP untuk kebutuhan psikologis dan rohani anak serta keluarganya hanya 28,5% dari jumlah keseluruhan responden. Secara umum guru SMP Negeri kota Blitar dalam pemanfaatan TPP untuk psikologis dan rohani anak serta keluarganya dikatakan baik. Adapun persentase yang menggunakan paling tinggi berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk membiayai sekolah atau kuliah anak sebanyak 37,62%. Hal tersebut dapat terjadi karena bagi seorang guru

pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar untuk menunjang kelangsungan hidup suatu individu, apalagi pendidikan bagi anaknya merupakan hal yang perlu diutamakan. Pola pikir yang seperti itulah yang dapat mendorong guru menggunakan dana TPP untuk kebutuhan non kompetensi. Sedangkan persentase yang menggunakan paling rendah berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk membiayai umroh atau haji dengan nilai 21%. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena agama yang non muslim atau hal lain.

Tabel 9. Pemanfaatan TPP Pada Sub Indikator Kebutuhan Rumah Tangga

Pernyataan	Persentase Jawaban Responden		
	Tidak	Menggunakan	Kategori
Penggunaan TPP untuk membeli tanah dan sawah	76,16%	23,84%	Baik
Penggunaan TPP untuk membiayai asuransi atau tabungan setiap bulan	67,95%	32,05%	Baik
Penggunaan TPP untuk membiayai cicilan motor atau tambahan membeli mobil	71,26%	28,74%	baik
Penggunaan TPP untuk membiayai perbaikan mengganti lampu, cat dinding, atau mengganti atap rumah, pipa, keran air dll.	69,4%	30,6%	Baik
TOTAL	69,35%	30,65%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Pada tabel 9, diketahui bahwa skor total pada sub indikator kebutuhan rumah tangga yaitu sebesar 2.150. Sementara skor ideal pada sub indikator ini yaitu: $5 \times 4 \times 155 = 3.100$, berikut adalah perhitungan skor jawaban responden pada sub indikator kebutuhan rumah tangga:

$$\begin{aligned} \text{Skor Jawaban} &= \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{2.150}{3.100} \times 100\% \\ &= 69,35\% \end{aligned}$$

Berdasarkan sajian dalam tabel, dapat dikatakan bahwa guru SMP Negeri di kota Blitar yang menggunakan TPP untuk kebutuhan rumah tangga hanya 30,65% dari jumlah keseluruhan responden. Secara umum guru SMP Negeri di kota Blitar dalam memanfaatkan dana TPP untuk kebutuhan rumah tangga dikatakan baik, karena 69,35% guru tidak menggunakan TPP untuk psikologis dan rohani anak serta keluarganya.

Adapun persentase yang menggunakan paling tinggi berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk membiayai asuransi atau tabungan setiap

bulansebanyak 30,05%. Hal tersebut dapat terjadi karena bagi seorang guru keamanan di masa yang akandatang perlu dipersiapkan mulai awal, sehingga jika ada keperluan yang tidak terduga dapat digunakan. Pola pikir yang seperti itulah yang dapat mendorong guru menggunakan dana TPP untuk kebutuhan non kompetensi yakni membiayai asuransi atau tabungan setiap bulan.

Persentase paling rendah berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk membeli tanah atau sawah yang memperoleh persentase 23,84%, artinya sebanyak 76,16% atau sebagian besar guru SMP Negeri di kota Blitar tidak menggunakan dana TPP untuk membiayai kebutuhan non kompetensi seperti membeli tanah atau sawah. Hal tersebut dapat terjadi karena membeli tanah atau sawah membutuhkan biaya yang cukup banyak, sementara besar TPP yang diperoleh guru belum cukup untuk memenuhinya.

Tabel 10. Pemanfaatan TPP Pada Indikator Kompetensi

Sub Indikator	Skor Nilai	Persentase Jawaban Responden		Kategori
		Menggunakan	Tidak	
Kompetensi Pedagogik	3.754	69%	31%	Baik
Kompetensi Kepribadian	1.061	68,45%	31,55 %	Baik
Kompetensi Sosial	1.049	67,66%	32,34 %	Baik
Kompetensi Profesional	1.141	73,61%	26,39 %	Baik
TOTAL	7.005	70%	30%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Pada tabel 10 di bawah ini, diketahui skor total indikator kompetensi yaitu sebesar 7.005. Sementara skor ideal pada indikator ini yaitu: $5 \times 13 \times 155 = 10.075$, berikut total perhitungan skor jawaban responden pada indikator kompetensi:

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Jawaban} &= \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{7.005}{10.075} \times 100\% \\
 &= 69,53\% \\
 &= 70\% \text{ (Pembulatan)}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas apabila dimasukkan dalam kelas interval termasuk pada kategori baik dengan tipe item pernyataan adalah positif, sehingga dapat dikatakan bahwa dari jumlah keseluruhan responden rata-rata 70% guru SMP Negeri kota Blitar menyatakan bahwa mereka menggunakan dan membelanjakan TPP untuk menunjang kompetensinya dengan baik. Adapun persentase paling tinggi yang menggunakan TPP untuk kompetensi berada pada sub indikator kompetensi profesional yaitu 73,61%, sedangkan persentase paling rendah berada pada sub indikator kompetensi sosial yaitu 67,66%.

Tabel 11. Pemanfaatan TPP Pada Indikator Non Kompetensi

Sub Indikator	Skor Nilai	Persentase Jawaban Responden		Kategori
		Tidak	Menggunakan	
Kebutuhan fisik atau jasmani	2.627	67,79%	32,21%	Baik
Kebutuhan psikologis dan rohani	2.767	71,5%	28,5%	Baik
Kebutuhan rumah tangga	2.150	69,35%	30,65%	Baik
TOTAL	7.544	70%	30%	Baik

Sumber: Data Primer Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa skor total pada indikator non kompetensi yaitu sebesar 7.544. Sementara skor ideal pada indikator ini yaitu: $5 \times 14 \times 155 = 10.850$. Berikut adalah perhitungan skor jawaban responden pada indikator non kompetensi :

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Jawaban} &= \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{7.544}{10.850} \times 100\% \\
 &= \frac{7.544}{10.850} \times 100\% \\
 &= 70\% \text{ (Pembulatan)}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas apabila dimasukkan dalam kelas interval termasuk pada kategori baik, sehingga dapat dikatakan bahwa dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 30% guru SMP Negeri kota Blitar menyatakan bahwa mereka menggunakan dan membelanjakan TPP untuk menunjang keperluan non kompetensi. Adapun persentase paling tinggi yang menggunakan TPP untuk non kompetensi berada pada sub indikator kebutuhan fisik atau jasmani yaitu 32,21%, sedangkan persentase paling rendah berada pada sub indikator kebutuhan psikologis dan rohani, yaitu 28,5%. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemanfaatan TPP dilihat dari aspek non kompetensi dapat dikatakan baik karena banyak yang tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan non kompetensi yaitu sebesar 70% dari jumlah keseluruhan responden.

Pembahasan

Pemberian TPP merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui peningkatan profesionalisme guru. Program tersebut diperuntukkan bagi guru yang sudah bersertifikasi dan memenuhi standar kompetensisesuai Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005tentang Guru Dan Dosen pasal 10 yang menyatakan guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pada penelitian ini indikator kompetensi terdiri atas empat sub indikator,

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Pada sub indikator pedagogik mempunyai nilai persentase 69,2% yang berada pada kategori baik. Meskipun ada item pernyataan yang memperoleh kategori cukup baik, karena persentase yang menggunakan rendah yaitu hanya 46,49%. Hal tersebut dapat terjadi karena bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi membutuhkan pertimbangan waktu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, sedangkan kondisi guru SMP Negeri di kota Blitar rata-rata tidak memungkinkan untuk memenuhinya. Adapun penggunaan TPP dilihat dari aspek kompetensi pedagogik paling tinggi berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk pembuatan bahan ajar dan penggunaan TPP untuk membeli laptop, printer, speaker, flasdisk dan kebutuhan mengajar lainnya, dengan total persentase yang menggunakan sama-sama 81%. Menurut Payong (2011:16) pengertian kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pada sub indikator ini terdapat tujuh item pernyataan yang berisi tentang: penggunaan TPP untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, penggunaan TPP untuk mengikuti seminar dan workshop, penggunaan TPP untuk berlangganan koran dan majalah, penggunaan TPP untuk pembuatan bahan ajar, penggunaan TPP untuk membeli laptop, printer, speaker, flasdisk dan kebutuhan mengajar lainnya, penggunaan TPP untuk melakukan penelitian tindakan kelas, dan penggunaan TPP untuk berlangganan wifi. Secara umum pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri di kota Blitar menunjukkan bahwa 69,2% guru memanfaatkan untuk kompetensi pedagogiknya dengan baik.

Pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri di kota Blitar pada sub indikator kepribadian memiliki nilai persentase 68,45% yang berada pada kategori baik. Payong (2011:18) mengatakan bahwa kompetensi kepribadian “adalah kemampuan kepribadian guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia”. Pada sub indikator ini terdapat dua item pernyataan yang berisi tentang: penggunaan TPP untuk memberikan sedekah pada masyarakat, dan penggunaan TPP untuk menyumbangkan hadiah kepada peserta didik saat ada kegiatan sekolah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari jumlah responden 68,45% guru SMP Negeri di kota Blitar menggunakan TPP untuk kompetensi kepribadiannya.

Pada sub indikator sosial memiliki nilai persentase 67,66% yang berada pada kategori baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Payong (2011:19) bahwa yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Pada sub indikator ini terdapat 2 (dua) item pernyataan yang berisi tentang: penggunaan TPP untuk berpartisipasi kepada peserta didik ketika orang tuanya meninggal, dan penggunaan TPP untuk berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di luar lingkungan sekolah. Hasil penelitian pada sub indikator sosial ini dapat dikatakan bahwa 67,66% guru SMP Negeri di kota Blitar menggunakan TPP untuk kompetensi profesionalnya.

Pada sub indikator professional memiliki nilai persentase 74,9% dan berada pada kategori baik. Menurut Payong (2011:21) kompetensi professional adalah kemampuan menguasai struktur keilmuan atau materi pelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan membimbing peserta didik untuk menguasai pengetahuan atau ketrampilan secara optimal. Pada sub indikator ini terdapat dua item pernyataan yang berisi tentang: penggunaan TPP untuk membeli buku yang relevan untuk mengajar, dan penggunaan TPP untuk mengembangkan materi pembelajaran dengan buku edukatif. Hasil penelitian pada sub indikator sosial ini dapat dikatakan bahwa sebanyak 74,9% guru SMP Negeri di kota Blitar menggunakan TPP untuk kompetensi profesionalnya.

Dari keempat sub pada indikator Kompetensi, pemanfaatan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) termasuk pada kategori baik, dengan nilai persentase 70%. Artinya dari seluruh jumlah responden, 70% guru SMP Negeri di kota Blitar menyatakan bahwa mereka menggunakan TPP untuk kebutuhan kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional sebagaimana amanat Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 bahwa TPP diberikan untuk guru profesional yang memiliki empat kompetensi tersebut. Adapun persentase paling tinggi yang menggunakan TPP untuk kompetensi berada pada sub indikator kompetensi profesional yaitu 73,61%, sedangkan persentase paling rendah berada pada sub indikator kompetensi sosial yaitu 67,66%. Kompetensi menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 3 adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Maka pemanfaatan dana TPP harus digunakan untuk kebutuhan kompetensi agar tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran menjadi berkualitas

sehingga mendorong peserta didik mendapatkan hasil belajar yang memuaskan.

Dari keseluruhan total responden, 70% guru menyatakan bahwa mereka membelanjakan TPP untuk keperluan yang menunjang kompetensi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana teorinya Maslow (dalam Asmadi, 2008:19), bahwa seseorang membutuhkan *belonging and love, self esteem (harga diri)*, dan aktualisasi diri: (1) sebagai seorang guru juga membutuhkan *belonging and love*, di mana mempunyai hubungan yang baik dan efektif dengan peserta didik dapat membuat pembelajaran yang disampaikan mudah diterima, hubungan dengan sesama pendidik dan warga sekolah juga perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Penggunaan TPP seperti memberikan sedekah pada masyarakat, dan penggunaan TPP untuk menyumbangkan hadiah kepada peserta didik saat ada kegiatan sekolah semata-mata untuk pencitraan yang digunakan guru supaya mendapatkan cinta dan menjadi bagian dalam lingkungan sekolah sehingga tidak diasingkan dalam kehidupan bermasyarakat; (2) adapun untuk kebutuhan *self esteem* di mana ada dua jenis yaitu *self respect* dan *respect from other*. Mendapatkan penghargaan dari orang lain (*respect from other*), berupa ketenaran, menjadi orang penting dan diterima oleh seluruh warga sekolah menjadi suatu kebutuhan bagi guru, seperti bersikap teladan dengan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial di luar lingkungan sekolah dan berakhlak mulia seperti berpartisipasi kepada peserta didik ketika orang tuanya meninggal. Menghargai diri sendiri (*self respect*) juga menjadi suatu kebutuhan tertentu bagi guru. Dengan menggunakan TPP untuk kompetensi pedagogik merupakan bentuk penghargaan terhadap kemampuannya sendiri, bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai profesi serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai guru merupakan bentuk menghargai diri sendiri, sehingga dengan menggunakan TPP untuk hal-hal tersebut dapat membuat dirinya diakui orang lain sebagai seorang guru profesional, kebutuhan penghargaan dari orang lain (*respect from other*); (3) aktualisasi diri menjadi suatu kebutuhan bagi guru. Profesi guru menjadikannya harus melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan pengajaran seperti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti seminar dan workshop, berlangganan koran dan majalah, membuat bahan ajar, membeli laptop, printer, speaker, flasdisk dan kebutuhan mengajar lainnya, melakukan penelitian tindakan kelas, atau untuk berlangganan wifi. Maka penggunaan TPP untuk hal tersebut semata-mata untuk aktualisasi diri yaitu untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang individu yang mempunyai profesi guru sehingga

harus melaksanakan segala sesuatu untuk peningkatan profesionalisme.

Pemerintah dalam memberikan dana TPP bukan untuk memenuhi kebutuhan guru di luar kompetensi karena tidak sesuai dengan tujuan utama pemerintah yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru. Pada penelitian ini indikator kedua yang digunakan dalam kuesioner ialah non kompetensi yang terdiri atas tiga sub indikator yaitu kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarga, kebutuhan psikologis dan rohani anak dan keluarga, kebutuhan rumah tangga.

Pada sub indikator dari non kompetensi yang pertama yaitu kebutuhan fisik atau jasmani memiliki lima item pernyataan, diantaranya adalah penggunaan TPP untuk anak atau keluarga yang sakit, penggunaan TPP untuk membeli alat-alat kesehatan, obat atau vitamin guna menjaga kesehatan anak dan keluarga, penggunaan TPP untuk kebutuhan baju anak dan suami atau istri, penggunaan TPP untuk kebutuhan seragam, sepatu, dan tas anak maupun keluarga, dan penggunaan TPP untuk kebutuhan *make-up*, alat kecantikan, perhiasan anak dan keluarga. Nilai persentase yang dihasilkan sebanyak 67,79% termasuk dalam kategori baik. Jadi dari keseluruhan jumlah responden 67,79% guru SMP Negeri di kota Blitar menyatakan tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarganya.

Pada sub indikator kebutuhan psikologis dan rohani memiliki nilai persentase 71,5% dengan lima item pernyataan yaitu, penggunaan TPP untuk sekolah atau kuliah anak, penggunaan TPP untuk bimbingan belajar anak, penggunaan TPP untuk umroh atau haji, penggunaan TPP untuk bimbingan belajar al-quran anak atau keagamaan lainnya, dan penggunaan TPP untuk jalan-jalan dan berwisata bersama keluarga. Secara umum guru SMP Negeri kota Blitar dalam pemanfaatan TPP untuk psikologis dan rohani anak serta keluarganya dikatakan baik. Adapun persentase yang menggunakan paling tinggi berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk membiayai sekolah atau kuliah anak sebanyak 37,62%. Hal tersebut dapat terjadi karena bagi seorang guru pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar untuk menunjang kelangsungan hidup suatu individu, apalagi pendidikan bagi anaknya merupakan hal yang perlu diutamakan. Pola pikir yang seperti itulah yang dapat mendorong guru menggunakan dana TPP untuk kebutuhan non kompetensi. Sedangkan persentase yang menggunakan paling rendah berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk membiayai umroh atau haji dengan nilai 21%. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena agama yang non muslim atau hal lain.

Adapun untuk sub indikator kebutuhan rumah tangga mempunyai nilai persentase 69,35% yang berada pada

kategori baik. Maka dari keseluruhan responden 69,35% guru SMP Negeri di kota Blitar menyatakan tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan rumah tangganya seperti untuk membeli tanah atau sawah, penggunaan TPP untuk asuransi atau tabungan setiap bulan, melakukan perbaikan mengganti lampu, cat dinding, atau mengganti atap rumah, pipa, keran air, dll. Persentase jawaban responden pada sub indikator ini yang menggunakan paling tinggi berada pada item pernyataan tentang penggunaan TPP untuk membiayai asuransi atau tabungan setiap bulan sebanyak 30,05%. Hal tersebut dapat terjadi karena bagi seorang guru keamanan di masa yang akan datang perlu dipersiapkan mulai awal, sehingga jika ada keperluan yang tidak terduga dapat digunakan. Pola pikir yang seperti itulah yang dapat mendorong guru menggunakan dana TPP untuk kebutuhan non kompetensi yakni membiayai asuransi atau tabungan setiap bulan.

Dari ketiga sub pada indikator non kompetensi pemanfaatan TPP oleh guru SMP Negeri di kota Blitar termasuk pada kategori baik dengan nilai persentase 70%. Artinya dari seluruh jumlah responden, 70% guru SMP Negeri di kota Blitar menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarga, kebutuhan psikologis dan rohani anak dan keluarga, serta kebutuhan rumah tangga. Dan sisanya 30% guru SMP Negeri di kota Blitar menyatakan menggunakan TPP untuk non kompetensi. Adapun persentase paling tinggi yang menggunakan TPP untuk non kompetensi berada pada sub indikator kebutuhan fisik atau jasmani yaitu 32,21%, sedangkan persentase paling rendah berada pada sub indikator kebutuhan psikologis dan rohani, yaitu 28,5%. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemanfaatan TPP dilihat dari aspek non kompetensi adalah baik karena banyak yang tidak menggunakan TPP untuk kebutuhan non kompetensi yaitu sebesar 70% dari jumlah keseluruhan responden.

Perilaku atau perbuatan guru yang memilih membelanjakan TPP untuk keperluan yang tidak menunjang kompetensi ini sesuai dengan teori Kebutuhan Maslow bahwa seseorang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan fisiologis, keamanan (*safety*), *self esteem*; (1) kebutuhan fisiologis seperti kesehatan anak dan keluarga dapat mendorong guru menggunakan TPP untuk kebutuhan yang tidak menunjang kompetensi, karena kebutuhan fisiologis ini berada pada tingkat pertama yang merupakan kebutuhan primer dan harus dipenuhi agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pada tingkat selanjutnya; (2) seseorang membutuhkan keamanan dan keselamatan (*safety*) seperti keamanan masa tua akan terjamin dengan membayar asuransi dan menabung, keselamatan di akhirat terjamin dengan menunaikan

ibadah haji atau umroh; (3) seseorang membutuhkan *self esteem*, di mana ada dua jenis yaitu *self respect* dan *respect from other*. Mendapatkan penghargaan (apresiasi) dari orang lain (*respect from other*) tentang penampilan fisik yang meliputi pakaian, perhiasan dan *make-up* menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian orang. Gelar yang diperoleh sebagai seorang Haji juga dapat membuat orang lain memberikan apresiasi dan mudah diterima di lingkungan masyarakat sekitarnya. Selain itu setiap orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya dikenal dan dinilai dengan baik oleh orang lain seperti membeli motor atau mobil membuat seseorang dinilai mempunyai kondisi ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa guru SMP Negeri di kota Blitar dalam memanfaatkan TPP ada yang digunakan untuk menunjang kompetensi dan ada yang tidak. Penggunaan TPP untuk menunjang kompetensi tersebut sebanyak 70% dari jumlah total responden dengan persentase tiap item pernyataan antara 47%-81%. Sedangkan sisanya 30% menggunakan TPP untuk kebutuhan lain (konsumtif untuk non kompetensi) persentase rata-rata guru yang menggunakan untuk konsumtif berkisar antara 19%-53%.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru SMP Negeri di kota Blitar menggunakan TPP untuk menunjang kompetensi merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi, karena nilai UKG Blitar pernah menduduki ranking teratas pada tahun 2012, dan di tahun 2015 juga masuk dalam jajaran teratas, sejak diadakan UKG sampai sekarang, Blitar selalu mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional. Sehingga pantas jika nilai UKG guru di Blitar tidak pernah dibawah rata-rata nasional, guru-gurunya menggunakan dan memanfaatkan TPP dengan baik untuk peningkatan kompetensi. Penggunaan untuk kompetensi tersebut sesuai dengan teori Kebutuhan Maslow bahwa seseorang membutuhkan kebutuhan dasar yaitu fisiologis, *safety*, *belonging and love*, *self esteem* dan aktualisasi diri.

PENUTUP

Simpulan

Pemanfaatan TPP pada indikator kompetensi, termasuk pada kategori baik dengan nilai persentase 70%. Artinya dari seluruh jumlah responden, 70% guru SMP Negeri di kota Blitar menyatakan bahwa mereka menggunakan TPP untuk menunjang kompetensinya, seperti: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang bahwa TPP diberikan untuk guru profesional yang memiliki empat kompetensi tersebut. Adapun persentase paling tinggi yang menggunakan TPP untuk kompetensi berada pada sub indikator kompetensi

profesional yaitu 73,61%, sedangkan persentase paling rendah berada pada sub indikator kompetensi sosial yaitu 67,66%.

Sedangkan pemanfaatan TPP pada indikator non kompetensi juga termasuk pada kategori baik dengan nilai persentase 70%, maka dapat dikatakan dari seluruh jumlah responden 70% guru SMP Negeri di kota Blitar menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan TPP untuk non kompetensi seperti: kebutuhan fisik atau jasmani anak dan keluarga, kebutuhan psikologis dan rohani anak dan keluarga, serta kebutuhan rumah tangga. Adapun persentase paling tinggi yang menggunakan TPP untuk non kompetensi berada pada sub indikator kebutuhan fisik atau jasmani yaitu 32,21%, sedangkan persentase paling rendah berada pada sub indikator kebutuhan psikologis dan rohani, yaitu 28,5%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa guru SMP Negeri kota Blitar dalam memanfaatkan TPP ada yang digunakan untuk menunjang kompetensi dan ada yang tidak. Penggunaan TPP untuk peningkatan kompetensi tersebut sebanyak 70% dari jumlah total responden. Sedangkan sisanya 30% menggunakan TPP untuk kebutuhan lain (konsumtif untuk non kompetensi). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru SMP Negeri di kota Blitar menggunakan TPP untuk peningkatan kompetensi dikatakan wajar, karena nilai UKG Blitar pernah menduduki ranking teratas pada tahun 2012, dan di tahun 2015 juga masuk dalam jajaran teratas, sejak diadakan UKG sampai sekarang, Blitar selalu mendapatkan nilai diatas rata-rata nasional.

Perilaku guru yang membelanjakan TPP untuk keperluan yang menunjang kompetensi dan untuk keperluan yang tidak menunjang kompetensi dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia seperti yang ungkapkan Maslow bahwa seseorang membutuhkan kebutuhan fisiologis, safety, *belonging and love*, *self esteem* dan aktualisasi diri.

Saran

Perlu adanya evaluasi diri bagi guru yang menerima TPP bahwa penerimaan TPP diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab atas profesi sebagai tenaga pendidik profesional, TPP harus digunakan untuk membiayai segala kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi dan produktifitas. Evaluasi tentang penggunaan dan pemanfaatan TPP perlu dilakukan oleh pemerintah setiap tahun di seluruh wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencegah penyalahgunaan TPP untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Besarnya anggaran negara yang digunakan untuk memberikan TPP kepada guru setiap tahun perlu diimbangi dengan program lain yang menjadi alat ukur

dalam pemberian TPP, seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu UKG, PKB, dan PKG, harus dilaksanakan dengan penyeleksian yang ketat dan dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kecurangan dari pihak manapun. Keterlibatan instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan juga penting bagi pembinaan pemanfaatan TPP. Dinas Pendidikan dapat mengadakan seminar atau pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kinerja dan kompetensi guru agar tanggung jawab guru dalam menerima TPP tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi.2008. *Konsep dasar Keperawatan*. Jakarta: Buku kedokteran EGC.
- Daryanto.2013. *Standar Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik*. Jakarta.
- Kunandar. 2011. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum KTSP dan sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa.2013. *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Payong, Marselus R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru: Konsep Dasar Problematika Dan Implementasi*. Jakarta: Indeks
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Riduwan.2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sembiring, Gorky. 2009. *Mengungkap Rahasia Dan Tips Mengajar Menjadi Guru Sejati*. Yogyakarta: Best Publisher
- Sudjana, Nana. 2002. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Usman, Mohamad Uzer. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyudi, Imam. 2012. *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

<http://www.forumgurunusantara.blogspot.co.id/2015/09/penyaluran-tunjangan-profesi-guru-harus.html>, diakses 4 Februari 2016.

<http://www.kemdikbud.go.id>, diakses 4 februari 2016

<http://www.koran-sindo.com>, Edisi 14-10-2015, diakses 4 februari 2016

